

IDE DAN PRAKSIS NEO-NASIONALISME DALAM MENGHADAPI TANTANGAN GLOBALISASI

Oleh: A.M. Hendropriyono¹

Abstract

Nowadays, Indonesia national history is moving to universalism and will experience the historical paradox process, namely, the movement unified as a result of science and technology development that is able to protect. Men will be flowed to grouping in their own national community. It happens for human being who claim justice and freedom. In the one hand, Capitalists as chief of globalization, nowadays, carry Neo-Liberalism as a thesis; in the other hand, there is Universal-Islam that carries Radicalism or terrorism as anti-thesis. Although they use a same language, reciprocally, they can not understand each other. The two languages, as if, come from two contradictory cultures, therefore, undoubtedly, they create the clash of civilization. The paradoxical and conflict phenomena will reduce if communities in nation-state succeed in consolidation based on their consciousness that: the synthesis of social-dialectic in this age is a new and fresh national life, as the raising of Neo-Nationalism in the Nation-States in all over the world.

Keywords: Neo-Nationalism, Globalization and Nation-States

A. Pendahuluan

Dalam kerangka pembangunan, harus diakui bahwa peran sejarah nasional satu bangsa sangat strategis dan fundamental, terutama dalam upaya membangun kesadaran nasional dan mempertegas identitas bangsa. Jika ditelaah lebih jauh, sejarah nasional Indonesia kini sedang bergerak ke arah universalisme dan akan mengalami proses *the historical paradox* (sejarah yang paradoks), yaitu gerakan menyatu akibat kemajuan ilmu dan teknologi yang tak mungkin dapat terbendung. Sementara itu, kenyataan lain menunjukkan bahwa manusia juga akan semakin terbawa arus untuk mengelompokkan diri dalam komunitas

¹ Jendral TNI Purnawirawan, mahasiswa Program Doktor Ilmu Filsafat pada Fakultas Filsafat UGM.

kebangsaan masing-masing. Hal itu tiada lain, menurut Soekarno (1958), terjadi akibat tuntutan sekalian umat manusia terhadap keadilan dan kebebasan.

Ramalan Presiden pertama RI yang nyaris tidak terdengar karena masyarakat internasional saat itu sedang sarat oleh feodalisme intelektual yang arogan, tiga dekade kemudian disampaikan kembali oleh John Naisbitt dan Patricia Abundene pada era 1990-an dalam bukunya yang berjudul *Megatrends 2000*, sehingga menggemparkan dunia. Kaum kapitalis yang memimpin globalisasi di masa ini mengusung Neo-Liberalisme sebagai tesis, yang berhadapan-hadapan dengan para penganut Islam Universal yang mengusung Radikalisme sebagai anti tesis, dalam bahasa yang sama, yaitu terorisme, yang secara resiprokal tidak dapat dimengerti. Bahasa tersebut digunakan secara universal oleh kedua belah pihak sebagai ungkapan atas pemikiran masing-masing yang berdasarkan dua kebudayaan yang nyaris bertentangan, sehingga memicu terjadinya *the clash of civilization* (konflik antar peradaban) di dunia ini (Huntington, 1996).

Fenomena paradoksal dan konflik yang berkelanjutan tersebut akan semakin berkurang, apabila masyarakat di negara-negara bangsa kelak berhasil melakukan konsolidasi atas dasar kesadaran mereka, bahwa sintesis dari dialektika sosial abad ini adalah satu kehidupan kebangsaan yang segar, sebagai kebangkitan dari Neo-Nasionalisme dalam entitas *the Nation States* (negara-negara bangsa) di berbagai belahan dunia.

B. Filosofi Kebangsaan Neo-Nasionalisme versus Neo-Liberalisme dan Radikalisme

Neo-Liberalisme telah membuka jalan bagi cita-cita pencerahan Immanuel Kant (1724-1804), untuk mencapai keadilan dan kebebasan individu melalui konsep Demokrasi Barat. Cita-cita kosmopolitanisme Kant merupakan bentuk dari Protestanisme Sekuler, yang sebagian besar manifestasi modernitasnya ternyata dianggap tidak sesuai dengan konsep Islam Universal oleh kaum radikal. Masalah pokok yang menjadi diskursus adalah prinsip *toleransi* yang bersifat paternalistik, yang sama-sama dianut baik oleh Neo-Liberalis, maupun oleh para penganut Islam Universal yang bercita-cita menegakkan *Daulah Islamiyah* (Kekuasaan Islam di dunia), dalam posisi masing-masing yang saling berhadapan-hadapan.

Sebagai warga dunia yang mempunyai hak yang sama atas bumi ini secara komunal, prinsip *kesanggrahan* dari Neo-Nasionalisme, yaitu satu posisi yang duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi bersifat lebih manusiawi, dibandingkan dengan sekedar menerima belas kasihan yang digariskan dalam prinsip toleransi. Tesis sosial dunia berupa Neo-Liberalisme dan anti tesisnya yang berupa Islam Universal, kini berlangsung dalam bentuk benturan antar peradaban. Meskipun pihak Barat telah mencoba meredam benturan tersebut dengan konsep *demokrasi konstitusional* (demokrasi parlementer) yang ditebarkan ke seluruh dunia, dengan diiringi oleh konsep *dekonstruksionisme*, yang menuntut perombakan total seluruh lembaga dan tata aturan internasional yang dirasakan tidak adil. Keadaan dunia dalam aspek hubungan antara negara dengan peradaban, berlangsung semakin sulit dan tidak jarang pula menunjukkan kecenderungan yang bersifat antagonistik. Masyarakat Islam dalam negara-negara bangsa yang bersifat moderat mengambil jarak terhadap Islam Universal, yang dalam konteks Indonesia dikenal sebagai penganut Islam Tradisional, yaitu Islam indijinisasi, yang sudah mempribumi, mengakar dalam budaya bangsa Indonesia (Arubusman, 2006).

Pada tataran mikro terdapat potensi persinggungan yang tajam antara Islam Universal dengan kaum non-Islam, sedangkan pada tataran makro terdapat pertentangan yang semakin nyata antara pihak Barat dan Non-Barat. AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan dan Tantangan) global dalam perspektif Non-Barat adalah konsep Kapitalisme dalam posisi menurun (*Kapitalismus im niedergang*) yang mengusung fasisme. Contoh aktual adalah ofensif strategis Amerika Serikat (AS) terhadap Irak pada tahun 2003, berupa kampanye militer fisik yang dilakukan karena pasar swatata dari *the invisible hands* sebagai konsep Kapitalisme yang naik (*Kapitalismus im aufstieg*) mengalami kegagalan. Namun demikian, mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, Indonesia harus menerima Globalisasi sebagai satu kenyataan (Soeharto, 1994). Demikian pula Indonesia harus siap menghadapi fenomena global dengan semakin mengelompoknya umat manusia ke dalam entitas-entitas lokal, yang sifatnya paradoksal terhadap arus globalisasi sebagaimana ramalan Bung Karno, John Naisbitt dan Patricia Abundene serta peringatan Soeharto. Kesiapan Indonesia harus dapat tercermin dalam modernisasi nasional

terhadap wawasan kebangsaan, yang berlangsung secara sistemik dan terus-menerus antar berbagai suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) di berbagai strata sosial.

Hakikat kebangsaan Indonesia menurut Notonagoro (1975) adalah satu kodrat manusiawi, sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, yang berbeda dengan paham liberal yang individualistis dan juga paham sosialisme komunis yang semata-mata menekankan kepada prinsip kolektivisme. Secara epistemologis menurut Ernest Renan, wawasan kebangsaan terbangun dari keinginan satu kelompok manusia untuk bersatu. Otto Bauer menambahkan, mereka bersatu karena persamaan karakter. Soekarno merangkum secara lebih luas, yaitu dengan dasar keinginan dan karakter yang sama, kelompok manusia tersebut bermukim dalam satu unit geopolitik, untuk lahir sebagai satu bangsa (Bung Karno, 1958).

Sebagai tulang punggung ketahanan nasional, pembangunan ketahanan regional ASEAN (*Association of the South East Asia Nations*), utamanya dalam aspek ekonomi dan keuangan, merupakan ketahanan nasional Indonesia di baris kedua. Wawasan kebangsaan yang segar memerlukan input besar-besaran dari segenap potensi kemanusiaan, lahir dan batin, sehingga pada akhirnya jurang kesejahteraan antara kaya dan miskin di Indonesia semakin mengecil. Kepadatan penduduk yang sebagian terbesar dari kalangan lapisan masyarakat bawah yang miskin, tidak dapat lagi diatasi dengan sistem transmigrasi nasional. Sementara itu migrasi spontan penduduk Indonesia ke luar negeri terhambat oleh berbagai macam kendala.

Kemiskinan struktural tidak saja menjadi realitas objektif namun realitas itu tampak mengarah pada menajamnya perbedaan tingkat kesejahteraan hidup warga bangsa ini. Lapisan masyarakat miskin semakin tebal, sementara lapisan golongan menengah dan atasnya semakin tipis. Akibatnya, jurang antara si kaya dengan si miskin di antara bangsa Indonesia semakin lama semakin melebar. Bilamana wawasan kebangsaan yang segar tumbuh dan berkembang dari pemahaman terhadap nilai dasar maka berbagai masalah bangsa dapat dipecahkan oleh generasi demi generasi dengan lebih mudah. Tidak efektifnya usaha pembinaan selama reformasi terhadap perkembangan wawasan kebangsaan telah menyebabkan semakin jauhnya ikatan batin antara generasi penerus dengan generasi pendiri *Nation State* (negara-bangsa)

Indonesia. Sebagai anggota masyarakat dalam satu negara-bangsa, manusia Indonesia harus dijaga agar tetap merdeka di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi dan memiliki kepribadian serta tradisinya sendiri di bidang kebudayaan. Kebebasan atas ketiga aspek tersebut menentukan identitas manusia Indonesia dalam pengelompokannya ke dalam entitas-entitas lokal yang sedang dalam proses pembentukan.

Kerenggangan hubungan batin generasi bangsa sekarang dengan generasi pendahulunya dan kondisi kemajemukan yang tidak bertitik temu merupakan kendala pokok yang mengganjal bangsa Indonesia untuk dapat menghasilkan kemampuan besar dalam menghadapi universalisme dan ide separatisme global. Di masa lampau, yaitu pada dasawarsa-dasawarsa pertama berdirinya Indonesia sebagai satu negara-bangsa, masyarakat berada dalam suasana perang menghadapi kolonialisme dan berbagai bentuk pengkhianatan yang bersifat ideologis, serta juga pemberontakan bersenjata di dalam negeri. Manusia Indonesia dahulu dihadapkan pada pilihan tatanan negara-bangsa yang mengandalkan kharisma Pemimpin Besar Revolusi sehingga di bawah Bung Karno dinamika orang Indonesia demikian tinggi. Meskipun jumlah penduduknya demikian besar, seperti terlihat ketika menyelesaikan masalah bangsa dalam merebut Irian Barat kembali ke pangkuan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dan bahkan mampu memimpin negara-negara *the New Emerging Forces* (Negara-negara kekuatan Baru) dalam menanggapi ketidakadilan universal. Ketika dinamika dan stabilitas otokratis yang kokoh itu dilanjutkan Pak Harto tetapi kemudian hancur berantakan pada tahun 1998, para politisi Indonesia kini telah memilih demokrasi liberal sebagai tatanan politik internal negara. Dengan demokrasi model tersebut sebagai instrumen, basis sosial negara kebangsaan menjadi luas karena seluruh masyarakat terlibat dalam memecahkan masalah nasional.

Secara teoretis, perkembangan di atas seharusnya membuat sistem sosial politik menjadi lebih mantap dan sistem ekonomi seharusnya menjadi lebih kuat serta lebih kokoh dalam mempertahankan wawasan kebangsaan (Moerdiono, 1991). Namun ternyata usaha peningkatan ketahanan dalam aspek-aspek tersebut tidak terlihat secara aktual dalam kebersamaan masyarakat di bidang politik dan sosial ekonomi. Bahkan yang terjadi adalah penyerobotan hak demokrasi rakyat oleh partai politik sehingga

demokrasi yang berlangsung di Indonesia cenderung lebih layak disebut sebagai *partaiokrasi*. Pembiasan dari sistem demokrasi tersebut telah melahirkan penyakit berupa anarkisme yang semakin marak di kalangan masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh pelibatan berbagai komponen masyarakat yang kualitas dan juga aksesnya terhadap berbagai sumber daya masih sangat rendah. Tanpa pemahaman terhadap Neo-Nasionalisme, bangsa Indonesia sulit untuk menjawab berbagai AGHT nasional yang terus berdatangan secara bertubi-tubi. Proses pengambilan keputusan di berbagai strata kehidupan berlangsung terlalu lambat, bertele-tele dan menjadi sangat sukar dalam memecahkan berbagai isu yang dihadapi oleh bangsa Indonesia.

C. Integritas Filosofis dalam Dimensi Praksis Neo-Nasionalisme

Fenomena Neo-Nasionalisme di Indonesia harus disambut dengan senantiasa mengedepankan kebersamaan, dalam membentuk kader-kader kelas menengah dan atas masyarakat bangsa sebagai agen pembaharu yang tangguh. Di samping itu perlu lebih mementingkan aspek persatuan bangsa sesuai dengan asas Pancasila yang telah terbukti merupakan senjata paling ampuh dalam menghadapi segala macam rejim. Persatuan bangsa hanya akan terwujud dalam karya-karya masyarakat yang terorganisasi, bukan hanya sekedar termobilisasi. Dalam mengurus organisasi negara diperlukan manajemen bangsa yang diselenggarakan oleh administrasi pemerintahan RI. Ukuran nilai administrasi negara, terdiri atas: *Pertama*, semangat atau moril yang tinggi, moral yang luhur yang secara keseluruhan merupakan mental kejiwaan masyarakat yang tanggap dan tanggon. *Kedua*, disiplin sosial yang tinggi karena merupakan syarat mutlak keberhasilan sistem demokrasi. *Ketiga*, rasa persatuan dalam kebangsaan tanpa diskriminasi dan sentimen SARA. *Keempat*, kualitas dan profesionalisme masyarakat yang dibangun atas dasar ilmu dan teknologi tepat guna dari negara-negara maju. Pembangunan bangsa masa kini adalah demi masa sekarang dan demi masa depan. Dengan demikian maka prinsipnya hanya akan meliputi peningkatan kualitas pendidikan, teknologi, infrastruktur, *network* (jejaring) nasional dan internasional serta akses terhadap kapital (sumber daya keuangan). Tidak mengeksploitasi kekayaan alam sama sekali, terlebih lagi sumber daya alam yang tak terbarukan,

sebagaimana sistem pembangunan pada bangsa Singapura, Jepang, Taiwan dan lain-lain yang tidak mempunyai sumber daya alam.

Pada hakikatnya Neo-Nasionalisme merupakan satu integritas filsafati dari nasionalisme dan Islam tradisional, serta berbagai agama yang hidup dalam masyarakat pluralistik Indonesia. Karena itu penggunaan bahasa dalam rangka mengungkapkan pemikirannya, termasuk refleksi kritis bangsa Indonesia terhadap ketidakadilan dunia, dapat dimengerti secara universal.

Ontologi Neo-Nasionalisme yang jauh dari cita-cita untuk menguasai dunia yang mengglobal ini membuat pemikiran tersebut jauh lebih realistis jika dibandingkan dengan Kosmopolitanisme dan kewarganegaraan dunia sebagaimana cita-cita pencerahan para Kantianis. Demikian pula halnya jika dibandingkan dengan *Daulah Islamiyah* sebagaimana cita-cita radikal Islam Universal. Tataran operasional Neo-Nasionalisme harus bersifat praksis, antisipatif dan evaluatif terhadap fenomena paradoks universalisme.

Praksis yang bersifat antisipatif bagi Indonesia dalam menyambut datangnya gelombang Neo-Nasionalisme abad ini, antara lain:

1. Memacu peningkatan kualitas pendidikan untuk membangun masyarakat profesional yang pada gilirannya mempertebal lapisan masyarakat Indonesia golongan menengah dan atas. Kompetisi positif pada lapisan-lapisan tersebut akan memperkecil *gap* antara kaya dan miskin.
2. Mengembalikan roh atau jiwa Pancasila ke dalam batang tubuh UUD 1945 hasil empat kali amandemen (Effendi, 2007).
3. Memperkuat barisan Islam tradisional (pribumi) dalam keberhadapannya dengan Islam Universal yang bertipologi radikal.
4. Memacu penerapan alih teknologi tepat guna dalam meningkatkan segenap aspek ketahanan nasional.
5. Memacu pembangunan infrastruktur politik, sosial dan pertahanan atas dasar kearifan nasional.
6. Memacu pembangunan infrastruktur ekonomi, budaya dan keamanan atas dasar kearifan lokal.
7. Memacu pembangunan *network* (jejaring) ke berbagai sumber daya, utamanya ekonomi perdagangan nasional, regional dan internasional.

8. Membuka akses yang seluas-luasnya terhadap *Kapital* (sumber daya keuangan) baik di dalam maupun di luar negeri.
9. Memberlakukan sistem dwi-kewarganegaraan dengan negara-negara tertentu, yang bersifat simbiosis mutualistik dalam memecahkan berbagai *common issues* (isu bersama); misalnya, dalam mengatasi ledakan penduduk yang tak terelakkan, perlu kewargaan-ganda dengan negara yang jarang penduduknya. Demikian pula halnya untuk mencapai tujuan mendapatkan akses ke berbagai sumber kapital, yang terdapat di negara-negara maju dan kaya yang secara potensial tidak bertentangan dengan semangat nasionalisme Indonesia.
10. Memberlakukan penyatuan mata uang regional negara-negara ASEAN.
11. Memberlakukan wajib militer terhadap rakyat Indonesia berkondisi produktif berdasarkan konsep *conscript* (konskripsi) atau *draft* dalam rangka konsolidasi persatuan nasional bangsa Indonesia yang anti sentimen SARA.²
12. Melakukan moratorium terhadap pengelolaan berbagai jenis sumber daya alam yang tak terbarukan.
13. Menyelenggarakan secara terus-menerus konsensus nasional menghadapi berbagai macam isu global. Dalam menghadapi isu separatisme, misalnya, harus diselenggarakan referendum nasional untuk menentukan pendapat rakyat, bukan referendum lokal seperti yang pernah dilakukan di Timor Timur pada 1999.
14. Meningkatkan akses secara berkelanjutan ke berbagai badan kerjasama internasional dan lembaga hukum internasional. Kekalahan negara dalam sengketa internasional abad ini, cenderung merupakan akibat lemahnya kekuatan lobby universal, baik di *The International Court of Justice* maupun di *The International Criminal of Court*.
15. Melindungi segenap rakyat Indonesia dari aksi terorisme, dengan memberlakukan undang-undang intelijen yang berada di luar *the criminal justice system* (sistem peradilan kriminal), sehingga mampu memberikan ruang bagi *early warning system* (sistem pencegahan dini).

² Konsep ini merupakan penyesuaian dan juga sekaligus merupakan penyempurnaan dari Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata).

D. Penutup

Keharmonisan dalam kehidupan yang *interdependen* (saling tergantung) antar suku, agama, ras dan golongan di dalam unit geopolitik Indonesia merupakan hakikat dari Neo-Nasionalisme. AGHT yang paling mungkin akan dihadapi oleh Neo-Nasionalisme di negara-negara bangsa sebagai fenomena paradoks, yaitu disintegrasi perifer yang terjadi seiring dengan kemunculan entitas-entitas lokal.

Kecenderungan tersebut hanya dapat ditangkal oleh penyempitan ruang gerak berbagai aspirasi sektarianisme dan primordialisme dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Berbagai kebijakan seperti peraturan-peraturan di berbagai daerah yang bertentangan dengan praksis Pancasila harus digugurkan melalui berbagai *reviews*, baik *legislative review* maupun *executive review* sehingga tidak dapat meluas ke dalam aspek lain dalam *domain* kebijakan publik.

-JF-

DAFTAR PUSTAKA

- Arubusman, Muhyiddin, 2006. "Gerakan fundamentalisme Islam: dari Bawah Tanah sampai Perjuangan Politik Formal" dalam buku **Terorisme di Tengah Arus Global Demokrasi**, Editor: Syahdatul Kahfi, Penerbit Spectrum, Jakarta.
- Borradori, Giovanna, 2005, judul asli **Philosophy in Time of Terror**, diterjemahkan oleh Alfons Taryadi, dengan judul: **Filsafat dalam Masa Teror, Dialog dengan Jürgen Habermas dan Jacques Derrida**, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Castro, Fidel, 2002, **War, Racism and Economy Injustice**, Ocean Press, Melbourne.
- Effendi, Sofian, 2007, "Ceramah di forum Jati Diri Bangsa", Jakarta.
- Fakih, Mansour, 2006, **Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi**. Insist Press bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Floriberta, Aning, 2006, **Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno/ Ir Soekarno**, 1958, Penerbit Media Pressindo, Yogyakarta.
- Huntington, Samuel P. **Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia**, terjemahan oleh M Sadat Ismail, Penerbit Qalam, Yogyakarta.
- Isaak, Robert A, 2005. **The Globalization Gap**, Prentice Hall, New York.
- Kaelan, MS, 2004, **Filsafat Analitis menurut Ludwig Wittgenstein**. Penerbit Paradigma Yogyakarta.
- Maciavelli, Niccolo, 1513, **The Prince**.
- Miklethwait, John & Adrian Wooldridge, 2007, **Masa Depan Sempurna, Tantangan dan Janji Globalisasi**. Freedom Institute bekerjasama dengan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Mugasejati, Nanang Pamuji & Martanto, Ucu, 2006. **Kritik Globalisasi & Neo-Liberalisme**. Seri kajian sosial politik kontemporer/editor seri : Purwo Santoso, I Gusti Ngurah Putra, Fisipol UGM, Yogyakarta.
- Nurhadi MA dan Kamdani, 2005, **Kritik atas Akal Budi Praktis Immanuel Kant**. Pustaka pelajar Yogyakarta.
- Paul Hirst & Grahame Thompson, 2001, Judul asli: **Globalization in Question**, diterjemahkan oleh P Soemitro dengan judul: **Globalisasi adalah Mitos**, Yayasan Obor Indonesia, edisi pertama, Jakarta.
- Paulsen, Friederich, 1902, **Immanuel Kant: His live and doctrine**, Scribner, New York.
- Salam, Mohamad Faisal.2005, **Motivasi tindakan Terorisme**, Penerbit Pustaka Ilmu, Bandung.
- Soeharto, 1989, **Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya**, Jakarta.
- Soejadi, 1999, **Pancasila sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia**, Lukman Offset, Yogyakarta.
- Soekarno, Ir, 1958. **Kebangsaan Dalam Pancasila**, Pidato pada kursus Pancasila 16 Juni 1958 di Istana Negara, Jakarta.
- , 1958. **Kedaulatan Rakyat Dalam Pancasila**. Pidato di depan kader-kader Pancasila pada 22 Juli 1958 di Istana Negara, Jakarta.
- Stiglitz, Joseph, 2002, **Globalization and Its Discontents**, New York, USA.

- Magis-Suseno, Franz von, 2006, **Berebut jiwa bangsa**, Penerbit Kompas, Jakarta.
- , 1994, **Etika Politik**, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kant, Immanuel, 1956, **Critique of Practical Reason**, 1788, Terjemahan Lewis White Beck, The Liberal Arts Press. New York.
- Moerdiono, 1991. **Kehidupan Kebangsaan yang Segar**. Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Nurhadi, 2005. **Kritik Atas Akal Budi Praktis**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Tjahyadi, Lili, 1991, **Hukum Moral Ajaran Immanuel Kant tentang Etika dan Imperatif Kategoris**, Kanisius, Yogyakarta.
- Yunus, Muhammad, 2007. **Bank Kaum Miskin**, Terjemahan Irfan Nasution, PT Buku Kita, Jakarta